

**PELAKSANAAN PROGRAM KEMITRAAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT
DALAM PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN BERBASIS KOMUNITAS
(Studi Pada Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Desa Sengguruh Kecamatan Kepanjen
Kabupaten Malang)**

Amri Yulian Fahmy, Agus Suryono, Farida Nurani

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Malang

E-mail: selfdefense.9mm@gmail.com

***Abstract:** Implementation of Government and Community Partnership Program in Environmental Planning in Community-Based Settlement (PLP-BK) Sengguruh Village, District Kepanjen, Malang Regency. This activity is part of the National Program for Community Empowerment (PNPM) focuses on environmental management through the planning done by the villagers. The method used in this research is descriptive method qualitative approach, with a focus on (1) implementation of government and community partnership programs in Environmental Planning Community-Based Settlement (PLP-BK)/Neighborhood Development, (2) supporting factors and inhibiting in the implementation of the PLP-BK. The results showed, that the Department of Human Settlements and Spatial Planning has been performing duties as a working unit to facilitate the implementation of programs Community-Based Environmental Restructuring Settlements (PLP-BK). However, they do not perform their duties to assist and provide guidance to villagers Sengguruh in planning, management, and implementation. Moreover, collaboration in the implementation of activities is not maximized due to the perception of inequality in development planning resulted in the implementation of development be stunted.*

***Keyword:** implementation of partnership program, government, community, environmental planning community-based settlement (PLP-BK)*

Abstrak: Pelaksanaan Program Kemitraan Pemerintah dan Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLP-BK) Desa Sengguruh, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang berfokus pada penataan lingkungan melalui perencanaan yang dilakukan oleh masyarakat desa/kelurahan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan metode deskriptif pendekatan kualitatif, dengan fokus penelitian (1) Pelaksanaan program kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLP-BK)/Neighborhood Development Desa Sengguruh, (2) Faktor pendukung dan penghambat dalam program PLP-BK. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang telah menjalankan tugasnya sebagai satuan Kerja yang memfasilitasi penyelenggaraan program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLP-BK). Namun, dalam hal ini belum melaksanakan tugasnya untuk mendampingi dan memberikan bimbingan kepada masyarakat Desa Sengguruh dalam proses perencanaan, pengelolaan, dan pelaksanaan pembangunan. Selain itu, kolaborasi dalam pelaksanaan kegiatan belum maksimal dikarenakan adanya ketidaksamaan persepsi dalam perencanaan pembangunan sehingga mengakibatkan pelaksanaan pembangunan menjadi terhambat.

Kata kunci: pelaksanaan program kemitraan, pemerintah, masyarakat, penataan lingkungan permukiman berbasis komunitas (PLP-BK)

Pendahuluan

Pemberdayaan merupakan suatu pengembangan atas kelompok-kelompok tertentu di suatu wilayah agar dapat berdaya dan mandiri untuk meningkatkan taraf hidupnya melalui stimulus dari pemerintah,

baik itu berupa dana maupun pembangunan fisik dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya kemiskinan. Pemberdayaan pada dasarnya merupakan suatu bentuk model pembangunan yang berpusat pada manusia

(*People Centered Development*) yang menempatkan masyarakat sebagai inisiator dalam proses pembangunan sesuai dengan kebutuhan dalam peningkatan taraf hidup suatu kelompok masyarakat di suatu wilayah.

PLP-BK (Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas) yang merupakan salah satu program dari PNPM-MP (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan) yang merupakan intervensi lanjutan dari P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan) dan program ini adalah stimulan bagi keberhasilan masyarakat di desa atau kelurahan yang menjadi sasaran program P2KP yang mampu membangun lembaga masyarakat (BKM) di wilayahnya yang mencapai kualifikasi BKM Berdaya atau BKM Mandiri. Program penataan lingkungan ini tidak sebatas hanya pada pembangunan fisik, tetapi di dalam program ini masyarakat dituntut untuk bisa melakukan perencanaan dan membangun tatanan kehidupan warga di wilayahnya sesuai dengan visi, misi, dan tujuan yang telah disepakati bersama, dimana merupakan kerja kolaboratif dari pemerintah, BKM sebagai lembaga masyarakat swadaya, masyarakat lokal sebagai subyek utama dalam pengambilan keputusan, NGO/LSM, serta pihak swasta yang ikut mendukung kesuksesan program PLP-BK (Pedoman PLP-BK, 2008, h.2-3). Terpilihnya Desa Sengguruh sebagai basis penerapan Program Penataan Lingkungan Permukiman berbasis Komunitas (PLP-BK) dikarenakan BKM Kerto Adi telah menunjukkan kinerja yang baik dan masuk dalam kategori BKM Berdaya di Desa Sengguruh. Kemudian, BKM Kerto Adi merupakan lokasi P2KP yang berkinerja baik bersama Pemerintah Kota/Kabupaten masih menerapkan prinsip-prinsip kemitraan setara dengan Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PAKET), sehingga kegiatan kemitraan (*channeling*) masih berjalan.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pelaksanaan program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLP-BK) di Desa Sengguruh dengan menjalin kemitraan antara pemerintah

daerah dengan masyarakat sasaran program. Selain itu, juga untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLP-BK) di Desa Sengguruh. Program ini merupakan bantuan yang diberikan kepada setiap masyarakat desa/kelurahan yang dianggap sudah mencapai tingkat keberdayaan yang cukup, baik dari tingkat perencanaan sampai dengan pengelolaan dana bantuan yang diberikan kepada masyarakat untuk melaksanakan pembangunan.

Tinjauan Pustaka

A. Good Governance

Menurut OECD dan World Bank (dalam Sedarmayanti, 2009, h.273) yang mengartikan *Good Governance* sebagai penyelenggaraan manajemen pembangunan solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi yang langka, dan pencegahan korupsi secara politik dan administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan kerangka kerja politik dan hukum bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan. Menurut Rochman (dalam Sedarmayanti, 2009, h.277), *Good Governance* adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang substansial dan penerapannya untuk menunjang pembangunan yang stabil (dengan syarat utama efisien) serta relatif merata.

Menurut Sedarmayanti (2009, h.307), setiap pelaku *Good Governance* memiliki peran dan tugas masing-masing dalam mencapai tujuan hidup bernegara, yaitu:

1. Negara (*state*) berperan untuk menciptakan lingkungan politik dan hukum kondusif, dimana negara berperan dan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan publik, penyelenggaraan kekuasaan pemerintah, dan membangun lingkungan yang kondusif bagi tercapainya tujuan pembangunan pada tingkat lokal, nasional, maupun internasional serta global.
2. Sektor swasta berperan untuk menciptakan pekerjaan dan pen-

dapatan. Peran sektor swasta sangat penting dalam pola pemerintahan dan pembangunan, karena perannya sebagai sumber peluang untuk meningkatkan kegiatan produktivitas, penyerapan tenaga kerja, sumber penerimaan, investasi publik, pengembangan usaha, dan pertumbuhan ekonomi.

3. Masyarakat madani berperan dalam memfasilitasi interaksi sosial dan politik, menggerakkan kelompok masyarakat berperan serta dalam kegiatan ekonomi, sosial, dan politik.

B. Konsep Pemberdayaan

Menurut Sumodiningrat (1999, h.129) pemberdayaan merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan. Kemudian dalam proses belajar untuk mencapai kemandirian di dalam pemberdayaan, Sulistiyani (2004, h. 82–83) memberikan penjelasan mengenai tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam pemberdayaan.

1. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar serta peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.
2. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran dalam proses pembangunan.
3. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.

C. Kemitraan

Menurut Sulistiyani (2004, h.129) Kemitraan secara etimologis berasal dari kata *partnership* yang berasal dari suku kata *partner* yang berarti kawan, sekutu atau mitra. Secara definisi, maka kemitraan adalah suatu bentuk kerja sama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu atau tujuan tertentu sehingga memperoleh hasil yang lebih baik. Kemitraan dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu melalui model-model dalam penerapan kemitraan itu sendiri. Menurut Sulistiyani (2004, h.130) model-model kemitraan terbagi atas sebagai berikut:

1. *Pseudo partnership* (kemitraan semu)

Merupakan persekutuan yang terjadi antara dua pihak atau lebih, namun tidak sesungguhnya melakukan kerjasama secara seimbang satu dengan yang lain. Bahkan ada satu pihak belum tentu memahami secara benar akan makna sebuah kerjasama yang dilakukan, dan untuk tujuan apa itu semua dilakukan serta disepakati. Ada sesuatu yang unik dari semacam kemitraan ini, bahwa kedua belah pihak atau lebih sama-sama merasa penting untuk melakukan kerjasama, akan tetapi pihak-pihak yang bermitra belum tentu mengerti dan memahami substansi yang diperjuangkan dan manfaatnya apa.

2. *Mutualism partnership* (kemitraan mutualistik)

Merupakan persekutuan dua pihak atau lebih yang sama-sama menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan, yaitu saling memberikan manfaat lebih, sehingga akan mencapai tujuan secara optimal. Berangkat dari pemahaman akan nilai pentingnya melakukan kemitraan, dua organisasi atau kelompok atau lebih yang memiliki status sama atau berbeda melakukan kerjasama. Manfaat saling silang antara pihak-pihak yang melakukan kerjasama

dapat diperoleh sehingga sekaligus saling menunjang satu dengan lainnya.

3. *Conjugation partnership* (kemitraan melalui peleburan atau pengembangan)

Merupakan kemitraan yang dianalogikan sebagai *paramecium*. Dua *paramecium* melakukan konjungsi untuk mendapatkan energi dan kemudian terpisah satu sama lain dan selanjutnya dapat melakukan pembelahan diri. Bertolak dari analogi tersebut, maka suatu organisasi atau kelompok-kelompok, perorangan yang memiliki kelemahan di dalam melakukan usaha atau kegiatan dapat melakukan kemitraan dengan model ini. Dua pihak atau lebih dapat melakukan konjungsi dalam rangka meningkatkan kemampuan masing-masing.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Nazir (2005, h.54) tujuan dari penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, atau pun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Dalam penelitian ini, terdapat dua pokok bahasan fokus, yaitu: (1) Pelaksanaan program kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLP-BK)/*Neighborhood Development* Desa Sengguruh Kecamatan Kepanjen, yang meliputi: Peran Multi aktor dalam PLP-BK, peranan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dan Masyarakat Desa Sengguruh, kolaborasi antar aktor, dampak pelaksanaan kegiatan PLP-BK. (2) Faktor pendukung dan penghambat dalam program PLP-BK, meliputi: faktor pendukung dan penghambat Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dan faktor pendukung dan peng-

hambat Masyarakat Desa Sengguruh.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui proses wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis Miles & Huberman, dimana dalam model analisis ini terdapat tiga komponen analisis, yaitu: Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi.

Pembahasan

1. Pelaksanaan Program Kemitraan Pemerintah dan Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas Desa Sengguruh Kecamatan Kepanjen

Proses peningkatan taraf hidup masyarakat di suatu wilayah, baik itu dalam hal ekonomi, sosial, dan lingkungan dibutuhkan adanya proses pemberdayaan terhadap masyarakat sebelum menerapkan kegiatan yang bersifat partisipatif. Pemberdayaan masyarakat menurut Karta-sasmita dalam Prasojo (2004, h.14) menjelaskan bahwa “pemberdayaan masyarakat terkait dengan keberdayaan masyarakat, yaitu kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Suatu masyarakat yang sebagian besar anggotanya sehat fisik dan mental, terdidik kuat, dan inovatif tentunya memiliki keberdayaan yang tinggi”. Dimana pemberdayaan merupakan suatu wujud dari kerjasama antar pihak-pihak yang bersepakat untuk menjalankan kegiatan pemberdayaan melalui kemitraan. Kemitraan adalah “suatu bentuk kerja sama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu atau tujuan tertentu sehingga memperoleh hasil yang lebih baik” (Sulistiyani, 2004, h.129).

Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLP-BK) merupakan program lanjutan dari kegiatan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) atau kegiatan *channeling* lainnya yang ditujukan kepada masyarakat di suatu wilayah agar menjadi berdaya dan mandiri. Indikator dari pelaksanaan kegiatan

Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLP-BK) didasarkan atas Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang sudah mandiri dalam pengelolaan kelembagaan, keaktifan anggota, dan keuangan, serta melaksanakan kegiatan *channeling* dengan pemerintah daerah atau pihak swasta, sehingga apabila indikator tersebut terpenuhi maka masyarakat dapat mengajukan untuk melaksanakan program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLP-BK). Kegiatan program ini ditujukan sebagai proyek pembangunan fisik yang berbasis pada partisipasi masyarakat yang nantinya masyarakat secara keseluruhan akan merencanakan, pengawasan, melaksanakan pembangunan sesuai dengan prioritas bersama.

Pelaksanaan program Penataan Lingkungan Berbasis Komunitas (PLP-BK) di Desa Sengguruh dimulai pada tahun 2009 setelah BKM Kertoadi mendapatkan kesempatan untuk menjalankan kegiatan ini karena telah dianggap atau mencapai BKM berdaya/mandiri. Dalam pelaksanaan program ini, Masyarakat Desa Sengguruh diberi kesempatan untuk menjalankan program ini secara penuh mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan pembangunan dengan bimbingan tim teknis PNPM Kabupaten Malang serta Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Kabupaten Malang. Program ini diawali dengan tahapan persiapan, tahapan perencanaan partisipatif, tahapan pemasaran kawasan prioritas, dan tahapan pelaksanaan pembangunan. Untuk menjalankan proses pengelolaan program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLP-BK), maka dibentuk tim sukarelawan yang berasal dari masyarakat Desa Sengguruh untuk masuk ke dalam Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP), Tim Pemasaran (TP), dan Tim Pelaksana Pembangunan (TPP). Pelaksanaan program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas merupakan program yang memiliki jangka waktu pelaksanaan selama empat tahun berdasarkan tahapan yang telah dijalankan. Desa Sengguruh merupakan Desa/Kelurahan yang menjadi sasaran dari pelaksanaan Penataan Ling-

kungan Permukiman Berbasis Komunitas, namun dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan prosedur dan kesepakatan yang telah dibuat oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan masih adanya hambatan, baik dari pemerintah maupun masyarakat, sehingga pelaksanaan program PLP-BK menjadi terhambat.

a. Peran Multi Aktor dalam Pelaksanaan Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLP-BK)/*Neighborhood Development* di Desa Sengguruh Kecamatan Kepanjen

Dalam pelaksanaan program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLP-BK), terdapat peranan dari multi aktor bagi pihak-pihak yang terlibat dalam program tersebut. Hal ini sesuai dengan satu dari lima karakteristik menurut UNDP yang dikutip oleh Sedar-mayanti (2009, h.282), yakni proses interaksi pada *Good Governance*, dimana adanya pelibatan tiga unsur besar, yaitu: pemerintah sebagai pemangku kepentingan, pihak swasta sebagai pemilik modal, dan masyarakat sebagai pihak yang berinteraksi untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya secara sosial, ekonomi, dan politik.

Namun, dalam hal ini Masyarakat Desa Sengguruh belum bisa mendapatkan *channeling* kemitraan bersama dengan swasta. Hal ini dikarenakan dalam menjalankan kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti dalam program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLP-BK), dibutuhkan adanya dukungan dari pemerintah terhadap kemitraan yang dilakukan pihak swasta kepada masyarakat. Dimana, pihak swasta membutuhkan adanya aturan-aturan dari pemerintah yang melindungi dalam proses kemitraan yang dilakukan dengan masyarakat, karena program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLP-BK) merupakan kegiatan yang sifatnya jangka panjang. Selain itu, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) tidak dapat bekerja secara optimal karena adanya *overlapping* antara LPMD dengan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) di Sengguruh, yang mengakibatkan

masyarakat tidak terlindungi dalam melaksanakan proses kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLP-BK), sehingga masyarakat tidak memiliki daya tawar kekuatan hukum dalam pelaksanaan kegiatan, dan pelaksanaan kemitraan masyarakat dengan pihak swasta belum dapat direalisasikan di Desa Sengguruh.

a.1.) Peranan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang dalam Pelaksanaan Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLP-BK)

Peranan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang sebagai Satuan Kerja (SatKer) telah melaksanakan tugasnya dalam proses pencairan dana BLM kepada masyarakat dalam menunjang kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLP-BK). Akan tetapi, belum menunjukkan kepuasan kinerja dalam proses pendampingan dan pengarahan kepada masyarakat di Desa Sengguruh dalam proses penyelenggaraan kegiatan. Berdasarkan atas kajian yang dilakukan peneliti, bahwa Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang sebagai Satuan Kerja (SatKer) belum mampu untuk memberikan pendampingan terhadap masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di wilayah Desa Sengguruh. Dimana Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang beserta jajaran unit hanya beberapa kali melakukan peninjauan atas pelaksanaan Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLP-BK) di Desa Sengguruh. Peninjauan ini dilakukan hanya untuk menanyakan *progress* dari pelaksanaan kegiatan PLP-BK dan tidak ada tindak lanjut dari hasil peninjauan tersebut.

a.2.) Peranan Masyarakat Desa Sengguruh dalam Pelaksanaan Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLP-BK)

Masyarakat merupakan elemen inti dalam pelaksanaan program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLP-BK). Dimana dalam kegiatan

ini ditekankan atas partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan untuk desa maupun kelurahan yang menjadi sasaran dari program tersebut. Pengetahuan masyarakat akan program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLP-BK) di Desa Sengguruh belum diketahui secara menyeluruh oleh masyarakat desa. Pengetahuan secara detail akan program PLP – BK hanya diketahui oleh masyarakat yang mengikuti kepanitiaan yang tergabung dalam Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP), Tim Pemasaran (TP), dan tim Pelaksana Pembangunan (TPP). Faktor kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Desa Sengguruh menjadi penghambat dalam pengenalan program, karena wawasan dan pengetahuan masyarakat masih ada yang rendah sehingga pengetahuan akan PLP-BK hanya sebatas pada kegiatan “*noto deso*” atau proyek pembangunan pemerintah seperti halnya yang pernah dilakukan sebelumnya. Sehingga esensi dan nilai dari program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLP-BK) di Desa Sengguruh belum dapat dipahami oleh sebagian besar masyarakat.

Selain sebagai informan yang mengetahui segala sesuatu permasalahan yang berkaitan dengan infrastruktur di wilayahnya dan lebih mengetahui potensi yang dimiliki di wilayahnya untuk dikembangkan, masyarakat ambil bagian dalam proses pembangunan. Dimana keikutsertaan masyarakat dalam hal ini ditandai dengan terjun langsung dengan mencurahkan tenaga fisiknya dalam setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan serta membantu dengan menyediakan konsumsi bagi para warga yang bekerja secara tidak langsung menjalankan proses pengawasan terhadap pembangunan.

a.3.) Kolaborasi dalam Pelaksanaan Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLP-BK) Antara Pihak Pemerintah dan Masyarakat Desa Sengguruh

Kolaborasi dalam penyelenggaraan Penataan Lingkungan Permukiman Ber-

basis Komunitas (PLP-BK) merupakan bentuk sinergitas atas kerjasama yang mutlak dijalankan antar pihak yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Akan tetapi, kolaborasi antar *stakeholders* di dalam pelaksanaan program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLP-BK) mengalami ketim-pangan. Dimana, kolaborasi yang dilak-sanakan antara pihak pemerintah melalui Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang bersama dengan masyarakat menganut model kemitraan *Pseudo partnership* (kemitraan semu), merupakan kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, dimana adanya kesepakatan antar keduanya untuk menjalankan kemitraan karena sama-sama membutuhkan. Akan tetapi, pihak-pihak yang melakukan kemitraan belum tentu mengerti dari nilai-nilai kerjasama yang dijalankan (Sulistiyani, 2004, h.130). Hal ini dikarenakan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang dalam proses perencanaan pembangunan bersama dengan masyarakat, merubah keputusan-keputusan yang telah dibuat masyarakat secara sepihak, dimana perencanaan pembangunan yang dibuat oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang tanpa melakukan peninjauan kondisi riil di lapangan dan didasarkan atas didasarkan atas teori dan data sekunder. Hal ini mengakibatkan adanya perdebatan di dalam perencanaan pembangunan atas prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan.

Menurut Prasojo (2004, h.12) Pemberdayaan yang sepenuhnya melibatkan partisipasi masyarakat atau masyarakat menjadi pilihan yang paling menguntungkan di masa yang akan datang. Akan tetapi, dalam Pelaksanaan program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLP-BK) di Desa Sengguruh terlihat merupakan program yang bersifat *top down*, dalam hal ini masih adanya keputusan sepihak dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, khususnya pada proses perencanaan yang pada akhirnya keputusan tersebut tidak dapat berjalan sesuai dengan kesepakatan. Kemudian, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang belum dapat memberikan contoh pedoman maupun pen-

dampingan dalam menyusun Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) dan Rencana Tindak Penataan Lingkungan Permukiman (RTPLP). Sehingga, dengan demikian, Masyarakat Desa Sengguruh harus belajar secara mandiri ke wilayah-wilayah yang menjadi sasaran dari program PLP-BK, yakni wilayah Pasuruan.

b. Dampak Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLP-BK) di Desa Sengguruh

b.1.) Dampak Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas Terhadap Masyarakat Desa Sengguruh

Hasil yang ingin dicapai dalam program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLP-BK) di Desa Sengguruh adalah masyarakat yang sadar untuk merubah perilaku serta sikap atas lingkungan dengan mewujudkan tatanan masyarakat yang harmonis dengan lingkungan hunian yang “sehat, tertib, selaras, berjati diri, dan lestari”. Hasil yang nantinya akan dicapai ini merupakan suatu sikap kelompok atau masyarakat yang menyadari akan tatanan kehidupan lingkungan yang selaras dengan penataan pembangunan wilayah permukiman dari segala aspek. Dengan adanya program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLP-BK), masyarakat sudah mulai sadar untuk melakukan budaya sehat dan bersih di sekitar lingkungannya. Namun, tidak semua masyarakat di Desa Sengguruh sadar untuk berbudaya bersih dan sehat, hal ini dikarenakan masih adanya lahan kosong di sekitar wilayah RT/RW di Desa Sengguruh, dan terlebih lagi masih banyak masyarakat yang berpengetahuan rendah sehingga membuang sampah di sekitar pekarangannya tidak di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST). Selain itu, masih adanya masyarakat yang kurang sadar untuk hidup sehat dan bersih di lingkungannya, dimana masyarakat baru akan bergerak untuk menata lingkungan di sekitarnya apabila ada pemberitahuan atau adanya suruhan dari tokoh masyarakat seperti ketua RT/RW.

b.2.) Dampak Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas Terhadap Tata Kelembagaan di Desa Sengguruh

Keberadaan suatu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa merupakan pijakan bagi masyarakat untuk dapat beraspirasi mengenai perkembangan kondisi di desa atas pembangunan maupun kondisi lainnya yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Namun, pelaksanaan tata pemerintahan yang baik nampaknya belum diterapkan dalam kelembagaan desa seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dimana untuk BPD Desa Sengguruh belum tampak dalam proses PLP-BK yang seharusnya BPD melindungi masyarakat lewat Peraturan Desa (PerDes) atas sisi kreativitas warga.

Kemudian peran LPMD juga belum nampak karena sebagian besar anggota LPMD menjadi anggota BPD. Ironisnya dalam kelembagaan tersebut terjadi *double job* antara tugas LPMD dengan tugas BPD. Dengan adanya *double job* dalam tugas LPMD dan BPD mengakibatkan adanya kebingungan dari para anggota LPMD dan BPD dalam menjalankan tugas dan perannya masing-masing, sehingga kelembagaan LPMD dan BPD belum dapat dikatakan berjalan optimal. Hal ini tentu mengakibatkan adanya kendala pada pelaksanaan kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLP-BK), dimana LPMD Desa Sengguruh yang seharusnya berperan sebagai pengayom masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan tidak dapat berjalan, sehingga dalam proses perencanaan sampai dengan pembangunan masyarakat bergerak secara swadaya tanpa adanya dukungan dari LPMD.

2. Faktor pendukung dan penghambat Dalam Mensukseskan Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas di Desa Sengguruh

a. Faktor Pendukung dan Penghambat Dinas Cipta Karya dan Tata ruang dalam pelaksanaan Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLP-BK)

Faktor Pendukung

1. Adanya fasilitas dari pemerintah daerah dalam mendukung setiap kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLP-BK) di Desa Sengguruh.
2. Pemberian fasilitas kepada masyarakat mengenai *Channeling* atas program maupun dana untuk menyelenggarakan program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLP-BK).

Faktor Penghambat

1. Masyarakat yang menjadi Sukarelawan di Desa Sengguruh yang tidak dapat bekerja secara konsisten dalam pelaksanaan program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLP-BK).
2. Kurangnya tenaga pendamping pada tim teknis dalam pelaksanaan kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLP-BK).

b. Faktor Pendukung dan Penghambat Masyarakat Desa Sengguruh dalam pelaksanaan Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLP-BK)

Faktor Pendukung

1. Keterlibatan Masyarakat Desa Sengguruh yang besar dalam pelaksanaan Program PLP-BK.

2. Pemerintahan Desa Sengguruh dan lembaga desa yang stabil.

Faktor Penghambat

1. Kesulitan dalam penerapan program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLP-BK) dan program yang tidak sesuai dengan kondisi riil desa.
2. Ketidaksamaan persepsi antara tim fasilitator dengan masyarakat desa dalam proses perencanaan pembangunan.
3. Sulit mencari relawan dari masyarakat desa untuk tergabung ke dalam kepanitiaan PLP-BK di Desa Sengguruh.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka kesimpulan yang dapat diambil dalam Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLP-BK), bahwa Peran multi aktor dalam pelaksanaan Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLP-BK) di Desa Sengguruh, Masyarakat Desa Sengguruh belum bisa mendapatkan *channeling* kemitraan bersama dengan swasta. Karena masyarakat tidak memiliki daya tawar kekuatan hukum dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pelaksanaan kemitraan masyarakat dengan

pihak swasta belum dapat direalisasikan di Desa Sengguruh.

Peranan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang sebagai Satuan Kerja (SatKer) telah melaksanakan tugasnya dalam proses pencairan dana BLM kepada masyarakat dalam menunjang kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLP-BK). Akan tetapi, belum menunjukkan kepuasan kinerja dalam proses pendampingan dan pengarahan kepada masyarakat di Desa Sengguruh dalam penyelenggaraan kegiatan.

Masyarakat sebagai elemen utama dalam pelaksanaan Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLP-BK) di Desa Sengguruh berpartisipasi dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut. Namun, tidak semua masyarakat mengetahui secara menyeluruh esensi dari program PLP-BK. dimana, dengan adanya program ini masyarakat di setiap wilayah Desa Sengguruh mengajukan aspirasinya akan kebutuhan infrastruktur.

Kolaborasi antar aktor di dalam pelaksanaan program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLP-BK) di Desa Sengguruh mengalami ketimpangan, karena masing-masing pihak memiliki persepsi yang berbeda akan pembangunan sehingga proses pelaksanaan program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas menjadi terhambat dikarenakan konflik di dalam pemahaman atas perencanaan pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum (2008) **Pedoman Pelaksanaan Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLP-BK)**. Jakarta, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum.
- Nazir, Moh. (2005) **Metode Penelitian**. Bogor, Ghalia Indonesia.
- Prasojo, Eko (2004) **People and Society Empowerment: Perspektif Membangun Partisipasi Publik**. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* Vol. IV, No. 2. Hal. 12-18
- Sedarmayanti (2009) **Reformasi Administrasi Publik, Reformasi birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan: Mewujudkan Pelayanan Prima dan Good Governance (Kepemerintahan yang Baik)**. Bandung, PT. Refika Aditama.
- Sulistiyani, Ambar Teguh (2004) **Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan**. Yogyakarta, Penerbit Gaya Media.
- Sumodiningrat, Gunawan (1999) **Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial**. Jakarta, Gramedia.